



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIKKY ACHMAD SIDIK
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 744520

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.820.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 725 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. Tanah Seluas 37 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.418.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000



6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
7. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
8. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
9. MOBIL, CHRYSLER JEEP Tahun 1979, HIBAH TANPA AKTA Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	65.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.788.978.888
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.500.000.000
Sub Total	Rp.	9.592.478.888

III. HUTANG	Rp.	45.000.000
-------------	-----	------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.547.478.888
-----------------------------------	-----	---------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.